

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI ERA KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DAN MOON JAE IN TERHADAP RESOLUSI KONFLIK SEMENANJUNG KOREA

Sofiyatul Khoiriyah

Mahasisiwi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda 95 Banten 15412, Indonesia

e-mail: sofiyatulkh@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan nuklir di Korea Utara menjadi kekhawatiran serta ancaman bagi Korea Selatan yang tak berujung sampai saat ini. Melihat keadaan geografis, politik dan sejarah dari kedua negara Semenanjung Korea ini, terlihat Korea Selatan yang akan terancam dan dirugikan oleh ketidakstabilan perilaku Korea Utara. Sehingga fokus artikel ini ingin menganalisis kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemimpin kedua negara Semenanjung Korea yakni Moon Jae In dan Kim Jong Un, serta faktor-faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan itu. Mengingat pemimpin suatu negara merupakan instrumen negara yang menentukan arah geopolitik negara. penulis juga ingin menjelaskan sejarah penyebab krisis nuklir di negara Semenanjung Korea sampai pada titik saat ini dan penulis ingin menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai misi penyelesaian nuklir dan misil disemenanjung Korea dan solusi apa yang dihasilkan. analisa yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan model aktor rasional oleh Graham T Allison. Artikel ini berfokus pada perubahan kekuatan yang dipakai yaitu *hard power* dan *soft power*. Dalam artikel ini penulis mengambil metode kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder.

Kata Kunci: Kebijakan, Moon Jae In, Kim Jong Un, Nuklir, Korea

ABSTRACT

Nuclear development in North Korea has become a worry and a threat to South Korea which has not been endless to date. Looking at the geographical, political and historical conditions of the two Korean Peninsula countries, it appears that South Korea will be threatened and harmed by the instability of North Korean behavior. The focus of this article is to analyze the foreign policy taken by the leaders of the two Korean Peninsula countries, Moon Jae In and Kim Jong Un, and the factors that led them to make that decision. Given the leader of a country is a state instrument that determines the geopolitical direction of the country. The author also wants to explain the history of the causes of the nuclear crisis in the Korean Peninsula country to the present point and the author wants to analyze the efforts that have been made as a nuclear and missile settlement mission in Korea and what solutions have been produced. The analysis used in this article is the rational actor model approach by Graham T Allison. This article focuses on changing the power used, namely hard power and soft power. In this article the authors take qualitative methods and secondary data collection techniques.

Keywords: Policy, Moon Jae In , Kim Jong Un, Nuclear, Korea

PENDAHULUAN

Semenanjung Korea awalnya merupakan bagian kekaisaran Jepang, sampai pecahnya perang dunia II di putuskan bahwa Semenanjung Korea dibagi menjadi dua sepanjang parallel 38 (Wirawan, 2020). Wilayah ini juga merupakan kawasan strategis di asia timur yang sampai saat ini masih terlibat isu keamanan akibat pengembangan nuklir dan misil Korea Utara. Kehadiran isu nuklir dan misil Korea Utara ini menjadi kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan mengingat keadaan geografis, politik dan sejarah dari kedua negara ini, namun tidak hanya Korea Selatan saja tetapi ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara disekitarnya (Muhamad, 2018).

Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara ini diawali perang Semenanjung Korea pada tahun 1950-1953, karena pada saat itu Amerika Serikat yang mendukung Korea Selatan mengancam Korea Utara dengan senjata nuklirnya untuk memberhentikan perang di Semenanjung Korea. Meskipun ini tidak terealisasi tetapi cukup untuk membuat Korea Utara merasa khawatir dan akhirnya memulai untuk mengembangkan senjata nuklir dengan bantuan uni soviet. Sampai pada titik Korea Utara berhasil mengembangkan teknologi nuklir mereka sendiri dan akhirnya memperluas reaktor nuklir dan meningkatkan penelitian untuk menunjang militer maupun sipil. *Progress* yang dilakukan Korea Utara ini akhirnya diketahui oleh dewan keamanan PBB terkait pengawasan energi nuklir yakni IAEA (*international atomic energi agency*). Pada Juli 1977, Korea Utara menandatangani dan menyetujui kesepakatan dengan IAEA bahwa reaktor nuklir milik mereka harus

berada dalam pengawasan dan keamanan IAEA (Fischer, 1997).

Pada tahun 1985 usaha IAEA dalam mengawasi Korea Utara menghadapi krisis karena Korea Utara menolak mematuhi kesepakatan dengan IAEA serta NPT (*non-proliferation treaty*). Akibatnya kondisi ini mempengaruhi stabilitas keamanan di Semenanjung Korea dan negara-negara sekitarnya, untuk mengendalikan Korea Utara agar tidak memakai senjata nuklirnya terutama ketakutan akan terjadinya kembali perang antara kedua negara semenanjung ini.

Akhirnya Amerika turun tangan mengingat Amerika menaruh senjata nuklir di Korea Selatan akhirnya terbebas dari senjata nuklir. Akibat keputusan yang diambil Amerika ini membuahkan hasil, Korea Utara menyetujui agar tidak melakukan tindakan apapun tentang pengembangan senjata nuklir dan diharapkan penggunaan energi nuklir hanya untuk tujuan perdamaian. Namun ini tidak berlangsung lama, ketika IAEA ingin melakukan inspeksi reaktor dan material nuklir yang dikembangkan Korea Utara pihak mereka menolak itu ditambah Korea Utara mengemukakan bahwa mereka menyatakan tidak ingin terikat lagi dengan NPT. Dan sampai saat ini usaha untuk menghentikan pengembangan energi nuklir di Korea Utara tidak mencapai titik temu, sehingga dapat dikatakan Korea Selatan dan Korea Utara bisa sewaktu-waktu berperang ditambah perebutan wilayah di Semenanjung Korea dapat memarah ini semua (IAEA, 1998).

Hal ini membuat kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh pemimpin kedua negara semenanjung ini sangat penting bagi keberlangsungan stabilitas keamanan bagi masing-masing negara maupun dunia mengingat Semenanjung Korea merupakan kawasan strategis di asia timur. Untuk

menciptakan kondisi ini maka krisis nuklir negara Semenanjung Korea harus diselesaikan. Peran pemimpin kedua negara ini sangat mempengaruhi hasil akhir upaya ini karena geopolitik suatu negara dipresentasikan dari *decision making* pemimpin mereka. Adapun posisi pemimpin saat ini dipihak Korea Utara diduduki oleh Kim Jong Un sejak 2012-saat ini dan dipihak Korea Selatan diduduki oleh Moon Jae In sejak 2017 sampai saat ini. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa meskipun sejarah, bangsa, bahasa, ras dan wilayah geografis kedua negara semenanjung Korea ini hampir sama, karena dilatarbelakangi ideologi yang berbeda perilaku kedua negara ini berbeda dalam memandang dunia ini menjadi tantangan untuk menyelesaikan konflik energi nuklir dan misil di Semenanjung Korea. dan juga Korea Utara selalu dipimpin oleh orang yang otoriter perdamaian ini sangat sulit terjadi karena sifatnya yang anti menerima kekalahan dan berambisi untuk selalu menang. Berbeda dengan negara Korea Selatan yang selalu mengedepankan diplomasi dan sebisa mungkin untuk tidak berkonflik. Faktor-faktor yang membuat mereka berperilaku seperti itu akan dijelaskan melalui pendekatan model aktor rasional. Dan pada perkembangannya kekuatan yang tadinya memakai *hard power* menjadi *soft power* memberikan dampak positif bagi upaya perdamaian di Semenanjung Korea.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang menghasilkan sebuah temuan yang tidak menggunakan prosedur

statistik atau perhitungan dan cara lain bersifat kuantitatif (Maruster, 2013). Sedangkan Menurut Denzin dan Lincoln definisi dari penelitian kualitatif adalah pendekatan secara naturalistik dan interpretatif pada pemahaman seseorang terhadap suatu fenomena, ini diartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan dalam memahami suatu fenomena (tindakan, keputusan, keyakinan, *values*, dll) dan dijelaskan dengan realitas sosial. Dalam hal ini fenomena utama yang diamati pada artikel ini adalah kegiatan politik luar negeri Kim Jong Un dan Moon Jae In perihal resolusi konflik Semenanjung Korea yang akan dianalisis secara metode kualitatif.

Dengan demikian dalam penelitian ini menghasilkan suatu data deskriptif. Dan penyusunan penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diambil keterkaitan dan peranan dari data-data itu sebagai penopang penelitian jurnal ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan proses pengumpulan data melalui studi pustaka berupa buku, jurnal artikel, dan internet yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diambil untuk memperkuat topik yang diteliti (Raco, 2018).

Artikel ini menggunakan konseptual teoritis Graham T Allison yaitu model aktor rasional sebagai analisa pembuatan politik luar negeri Kim Jong Un dan Moon Jae In dalam upaya resolusi konflik di Semenanjung Korea . hal ini Model aktor rasional merupakan keputusan yang di ambil merupakan suatu pilihan rasional atas dasar pertimbangan rasional atas keuntungan dan kerugian sehingga di asumsikan akan menghasilkan keputusan yang logic terhadap

situasi dan akan memaksimalkan keuntungan. Untuk itu pada artikel ini penulis ingin meninjau apakah keputusan luar negeri pada era kepemimpinan Kim Jong Un dan Moon Jae In merupakan suatu keputusan rasional yang nantinya menguntungkan negaranya atas itu atau tidak. Dan apakah dengan memutuskan untuk mengupayakan resolusi konflik di Semenanjung Korea merupakan hal yang benar (Allison & Zelikow, 1971).

Artikel ini juga ingin menganalisis kekuatan apa yang digunakan Korea Utara dan Korea Selatan dalam menghadapi konflik Semenanjung Korea era kepemimpinan Kim Jong Un dan Moon Jae In. hal ini kekuatan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai keinginan yang ditujukan melalui *hard power* dan *soft power*. *Hard power* bersifat lebih memaksa dan dilakukan dengan kekerasan seperti menggunakan kekuatan militer, namun berbeda dengan *soft power* yang bersifat tidak menggunakan kekuatan militer dalam mempengaruhi pihak lain namun bukan berarti tidak menggunakan kekuatan (Delbora Setiawan, 2015).

Dengan daya tariknya *soft power* menurut Nye dalam mempengaruhi pihak lain dapat melalui unsur-unsur seperti budaya, nilai-nilai dan kebijakan. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam mencapai keinginan yang kita tujukan kita bisa mendapatkannya tanpa kita memaksa atau bahkan dengan kekerasan untuk mendapatkan keuntungannya (Nye Jr, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meninjau geopolitik Korea Selatan dan Korea Utara, negara ini sebelum terbagi menjadi dua bagian disebut dengan semenanjung Korea. karna betentangan secara ideologi dan politik akhirnya terpisah diikuti

dengan pecahnya perang Korea pada tahun 1950- 1953. Dan sejak Pembagian tersebut berdampak pada hubungan kedua Korea yang tidak harmonis sampai saat ini, karna upaya masing-masing negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan eskalasi senjata nuklir di Korea Utara menyebabkan mengancam stabilitas keamanan di Semenanjung Korea dan negara-negara sekitarnya.

Tindakan Korea Utara dalam eskalasi senjata nuklir dapat dijelaskan dengan model aktor rasional oleh Graham T Allison, ini menjadi pilihan rasional Korea Utara dalam rangka untuk bertahan dalam sistem internasional, walaupun perang Korea telah usai ini tidak menjamin Korea Utara akan aman dari serangan negara lain atau bisa kita sebut *security dilemma*, dimana konflik yang terjadi berdasar pada adanya rasa tidak aman terhadap negara sekitar (Jervis, 1978).

Menurut pratamasari (2019) kebijakan luar negeri Korea Utara menunjukkan tindakan, reaksi dan interaksi yang konsisten terhadap strategi nuklir untuk menjaga negara dari negara lain dan ekonomi. Karena krisis nuklir yang ditimbulkan Korea Utara, hal ini membuat negara-negara disekitarnya memberkan bantuan ekonomi pada Korea Utara.

Dimulai pada era kepemimpinan Kim Il Sung Korea Utara menikmati kemakmuran ekonomi akibat pengembangan nuklir yang dilakukann, ini kemudian dilanjutkan Kim Jong Il untuk mempertahankan imbalan atau bantuan ekonomi dengan menguji coba rudal nuklir secara berangsur-angsur untuk memprovokasi negara sekitarnya terutama Amerika. Dan dipertegas kembali oleh Kim Jong Un, dengan menyatakan bahwa konstitusi Korea menggunakan nuklir atas

kekuatan penuh, agar Amerika Serikat tidak bisa lagi mengancam Korea Utara.

Kim Jong Un pada masa kepemimpinannya mendeklarasikan telah berhasil menyelesaikan program nuklirnya dan mengujinya. Akibatnya ini menimbulkan ketakutan dan ketegangan pada negara sekitarnya bahkan dunia. Hal ini membuat Korea Utara sampai sekarang dapat mempertahankan keadaan ekonominya berkat pengembangan nuklirnya. Hal ini membuat Korea mendapat keuntungan dari pengembangan nuklir ini dan dapat di pastikan bahwa kegiatan ini benar-benar merupakan suatu pilihan rasional atas dasar pertimbangan rasional yang menghasilkan keputusan yang logis terhadap situasi dan akan memaksimalkan keuntungan (Pratamasari, 2019).

Pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara ini akhirnya memicu kembalinya perang Korea sewaktu-waktu di Semenanjung Korea, karena Korea Selatan merupakan tetangga Korea Utara dan mengingat keadaan geografis, politik dan sejarah dari kedua negara ini, otomatis membuat Korea Selatan terancam akan stabilitas keamanan. Karena itu sejak Korea Utara mengembangkan nuklirnya, Korea Selatan adalah negara yang paling mengupayakan pengurangan senjata nuklir bahkan penghilangan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara.

Fokus artikel ini adalah upaya yang dilakukan Moon Jae In pada masa kepemimpinannya dalam mengupayakan resolusi konflik Semenanjung Korea akibat pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara. Sejak awal masa kepemimpinannya, Moon Jae In menunjukkan dirinya berupaya menciptakan perubahan dalam hubungan antar kedua negara Semenanjung Korea yang

sebelumnya tidak dapat diubah. Dan juga mengupayakan untuk denuklirisasi Korea Utara dengan berkerja sama dengan Amerika Serikat terkait itu. Bahkan Moon Jae In untuk mencapai tujuan ini dia telah mengalokasikan dana politiknya dengan membayar dividen pada *Korean-summit*, namun keberhasilan untuk jangka panjang perlu diingat ini sangat di pengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi dan geopolitik. Aliansi Korea Selatan dengan negara lain juga ikut mempengaruhi kebijakan Korea Utara, terlebih fakta Amerika Serikat merupakan aliansi Korea Selatan (Lee & Botto, 2018).

Fakta bahwa Korea Utara menilai Amerika Serikat sebagai ancaman utama negaranya, ini tentu sangat mempengaruhi keputusan luar negeri Korea Utara dalam menimbang perdamaian di Semenanjung Korea akibat pengembangan senjata nuklir. Dan alasan Korea Utara mengembangkan nuklirnya juga salah satunya untuk mencegah Amerika Serikat tidak melakukan aksi yang memicu pertempuran militer atau senjata nuklir yang dimiliki AS (KBS World Radio, 2020).

Hal ini membuat Korea Selatan, khususnya pada era Moon Jae In berupaya untuk membangun kepercayaan di Semenanjung Korea, dengan latar belakang Moon Jae In membuatnya ingin menyatukan kedua negara semenanjung ini. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Moon Jae In dalam sikap Moon Jae In sepakat untuk tidak mengeskalasi instalasi THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) yang merupakan lambang dari kerja sama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, namun bukan berarti Korea Selatan mencabut instalasi THAAD sepenuhnya, Moon Jae In juga sepakat untuk tidak terlibat dalam kerja

sama sistem pemerintahan rudal yang dipimpin Amerika Serikat yang diwariskan pemerintahan Lee Myung-bak dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam aliansi trilateral (AS-Jepang-Korea Selatan). Penekanan yang dilakukan Moon Jae In pada masa awal pemerintahannya menunjukkan bahwa dia memiliki motivasi untuk menyelesaikan isu nuklir di Semenanjung Korea (Bhiswara, 2018)

Sikap Moon Jae In terhadap upaya resolusi konflik di Semenanjung Korea memperlihatkan geopolitik antar Korea, memperlihatkan bahwa Korea Selatan pada kepemimpinan Moon Jae In menganggap Korea Utara tidak hanya sebatas lawan, tetapi juga sebagai kawan yang potensial. Hal yang membuat Korea Utara sampai saat ini masih dianggap lawan karena ancaman nuklir dari Korea Utara. Namun di sisi lain Moon Jae In memandang Korea Utara juga adalah kawan yang potensial jika Korea Utara membuka lebar dialog atas perwujudan stabilitas di Semenanjung Korea, di awal pidatonya sebagai presiden dia mengungkapkan bahwa dia tidak menginginkan kehancuran atas Korea Utara, melainkan ingin terjadinya resolusi konflik antar Korea perlu dilakukan secara damai dan demokratis. Namun jika tidak demikian Korea Selatan dengan tegas akan mengambil tindakan militer dan memberikan sanksi ekonomi (Bhiswara, 2018).

Terdapat tiga pilar konvensional yang diadopsi oleh Moon Jae In sebagai upaya reunifikasi dan resolusi konflik antar Korea dalam kebijakan Berlin yaitu (1) *Peace*, menempatkan perdamaian sebagai prioritas tertinggi dan sebagai tumpuan kemakmuran. (2) *Spirit of mutual respect*, berkerja sama untuk menyelesaikan isu antar Korea terutama resolusi damai terhadap pengembangan nuklir Korea Utara. Tanpa ada rasa untuk

menruntuhkan satu sama lain dan tidak ada akasi unifikasi berdasarkan pemaksaan atau dengan cara yang illegal. (3) *Open policy*, bahwa dalam memuat kebijakan yang diambil harus melalui partisipasi dan interaksi publik. Untuk dipastikan bahwa kebijakan yang dibuat sepenuhnya dapat dipahami oleh rakyat (Ministry Of Unification, 2017).

Dalam melaksanakan ketiga kebijakan ini, Korea Selatan memiliki tiga tujuan utama yaitu (1) *Resolution of the north Korean issue and establishment of permanent peace*. Hal ini Korea Selatan berupaya untuk menyelesaikan nuklir secara damai dengan berkerja sama, dengan tujuan untuk menggantikan senjata yang selama enam puluh tahun terakhir ini terjadi. Untuk mencapai perdamaian permanen secara praktis dan kelembagaan. (2) *Development of sustainable inter-Korean relations*, hal ini Korea Selatan mewarisi perjanjian antar Korea yang telah ada dan mendorong perjanjian baru sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan internal terkait unifikasi dengan Korea Utara dan dalam rangka membuat kebijakan dan konsensus nasional antar kedua negara Semenanjung Korea. (3) *Realization of a new economic community on the Korean peninsula*, hal ini Korea Selatan ingin membangun *single market* di Semenanjung Korea untuk menciptakan ekonomi baru antar Korea dengan demikian akan menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Tidak hanya negara Semenanjung Korea tetapi juga negara sekitar Semenanjung Korea dipastikan akan merasakannya juga dengan rencana Korea Selatan membangun *Three Economic Belt* (Ministry of Unification, 2017).

Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Moon Jae In ini di nilai akan sangat menguntungkan

Korea Selatan. Dengan terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea membuat stabilitas keamanan dan ekonomi aman tanpa adanya ancaman dari Korea Utara. dengan begitu keputusan yang di ambil Moon Jae In merupakan keputusan yang rasional karena keputusan yang di ambil merupakan suatu pilihan atas dasar pertimbangan memaksimalkan keuntungan. Bahkan dalam hal ini bukan hanya Korea Selatan yang diuntungkan tetapi negara-negara sekitar Semenanjung Korea.

Pada perkembangan isu nuklir di Semenanjung Korea ini, analisis pada artikel ini terdapat dua kekuatan yang di pakai untuk mencapai kepentingan negaranya yaitu *hard power* dan *soft power*. Melihat historis Korea Utara dan Korea Selatan atas pecahnya perang Korea di Semenanjung Korea. sejak saat itu dalam perkembangannya Korea Utara dan Korea Selatan menggunakan *hard power* dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya. *Hard power* bersifat lebih memaksa dan dilakukan dengan kekerasan seperti gencatan senjata atau kekuatan militer, intinya bersifat militeristik.

Hard power yang digunakan Korea Utara untuk mempengaruhi pihak lain untuk kepentingan nasionalnya adalah pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara. pengembangan nuklir ini terjadi karena karena pada saat itu Amerika Serikat yang mendukung Korea Selatan mengancam Korea Utara dengan senjata nuklirnya untuk memberhentikan perang di Semenanjung Korea. Meskipun ini tidak terealisasikan tetapi cukup untuk membuat Korea Utara merasa khawatir dan mengira ini bisa mengancam kepentingan nasionalnya. Akhirnya memulai untuk mengembangkan senjata nuklir dengan bantuan Uni Soviet.

Sampai pada titik Korea Utara berhasil mengembangkan teknologi nuklir mereka sendiri. Bahkan pada beberapa kali kesempatan Korea Utara sempat menguji coba rudal balistiknya yakni pada tahun 2006, 2009, 2013, 2016 dan 2017. Dan Korea Utara juga telah mengklaim bahwa negaranya telah berhasil menciptakan bom hydrogen yang dapat di masukan pada rudal balistik antar benua, dan menegaskan ini mampu menjangkau Amerika Serikat (Ericssen, 2017).

Jadi sejak kepemimpinan Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Un. Dalam pemerintahannya keluarga Kim ini menggunakan *hard power* dalam upaya mencapai kepentingannya. Buktinya dengan pengembangan nuklir yang dilakukannya. Korea Utara yang kurang dalam stabilitas ekonominya berhasil mendapatkan bantuan dari negara lain terutama Korea Selatan (MOREN & Waluyo, 2014).

Begitu juga dengan Korea Selatan, sejak pecahnya perang Korea. Korea Selatan memakai *hard power* dalam upaya menjaga kepentingan nasionalnya. Kekuatan militer yang dimiliki Korea Selatan untuk menjaga kepentingan nasionalnya dibantu oleh Amerika Serikat karena aliansi yang dimilikinya. Hal ini Amerika Serikat menaruh senjata nuklirnya di Korea Selatan, ini juga yang membuat Korea Utara menghentikan serangannya kepada Korea waktu perang Korea 1950-1953. Namun berbeda dengan Korea Utara yang berhasil mandiri membuat teknologi nuklirnya lepas dari bantuan Uni Soviet. Korea Selatan tidak demikian. Ketidapatuhan Korea Utara pada IAEA (*international atomic energi agency*) dan NPT (*non-proliferation treaty*). Ini membuat Korea Selatan merasa semakin terancam karena

sewaktu-waktu pecahnya perang Korea untuk kedua kalinya dapat terjadi ditambah sikap Korea Utara yang tidak agresif dan tidak bisa ditebak. Untuk itu Korea Selatan melakukan gebrakan terkait penggunaan *hard power* menjadi *soft power*. *soft power* menurut Nye adalah bagaimana mempengaruhi pihak lain dapat melalui unsur-unsur kekuatan tanpa kekerasan seperti budaya, nilai-nilai dan kebijakan (Nye Jr, 2004).

Korea Selatan berupaya untuk melakukan resolusi konflik nuklir di Semenanjung Korea dengan *soft power*. Ini diprakasi dengan Pertemuan tingkat tinggi antar Korea (*inter-Korean summit*) yang di hadiri oleh Kim Jong Il dan Kim Dae Jung pada Juni 2000. Pertemuan ini menghasilkan keterbukaan Korea Utara terhadap ekonomi eksternal dan kekuatan politiknya, dengan hadirnya Kim Jong Il pada pertemuan tingkat tinggi ini saja melambangkan Korea Utara merubah kekuatan berpolitisnya ke kebijakan startegis Korea Selatan, yang mana ini berpotensi pada perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea (Aldikawati, 2015). Hasil yang di capai setelah pertemuan tingkat tinggi pertama ini menghasilkan reuni anggota keluarga yang terpisah (Korea Selatan dan Korea Utara), memperluas kerja sama dengan membangun jalur kereta Seoul-Shinuiju dan bahkan meningkatkan bantuan makanan dan pupuk untuk Korea Utara. dan dalam bidang budaya akibat pertemuan ini terjadi konser *orchestra symphony* bersama dari kedua negara di Seoul (Kartini, 2018).

Peristiwa tingkat tinggi ini terjadi lagi, ditandai dengan bertemunya presiden Kim Jong Un dan Moon Jae In pada April 2018 dalam rangka mendatangi Deklarasi Panmunjom. Dalam Deklarasi Panmunjom ini kedua negara diwakilkan pemimpinnya yakni

Kim Jong Un dan Moon Jae In mendeklarasikan kepada publik terutama rakyat Korea bahwa tidak ada perang di Semenanjung Korea. peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah Korea karena akhirnya mengabdikan aspirasi rakyat kedua negara itu untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan unifikasi di Semenanjung Korea. ini berarti apa yang dijanjikan oleh Moon Jae In dalam tiga pilar kebijakan yang diungkapkan dirinya pada awal kepemimpinannya terbukti tercapai dan memenuhi aspek ketiga pilar tersebut (Kartini, 2018).

Akibat Deklarasi Panmunjom ini memberikan dampak positif bagi kedua negara untuk rekonsiliasi, perdamaian dan kesejahteraan bagi masing-masing pihak. Poin penting yang dihasilkan dari Deklarasi Panmunjom yaitu, (1) denuklirisasi (2) rezim damai (3) kunjungan Pyongyang (4) reuni keluarga (5) bergabung dalam kekuatan olahraga Asian games 2018 (6) menghilangkan ketegangan militer dengan perlucutan senjata (7) mendeklarasikan tidak ada perang di Semenanjung Korea. (Kartini, 2018)

Upaya lainnya yang dilakukan kedua negara ini dalam menciptakan perdamaian di semenanjung Korea dengan menggunakan *soft power* adalah dengan berpartisipasi pada Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang. Dengan desakan dari presiden Moon Jae In untuk berpartisipasi dalam pekan olahraga ini. Sebagai upaya Moon Jae In merefleksikan aspirasi rakyat Korea untuk perdamaian di Semenanjung Korea. kesediaan Kim Jong Un mengirim delegasi ke pyeongchang menandai hubungan antar Korea yang semakin erat dan menciptakan hubungan yang harmonis bagi kedua negara semenanjung ini (Noorzaman, 2020)

SIMPULAN

Akibat pengembangan nuklir dan uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara menciptakan ketidakstabilan dan ketidakamanan bagi dunia terutama Korea Selatan dan negara-negara di sekitarnya. Faktor yang membuat Korea Utara bertingkah seperti itu karena menurut Korea Utara ini adalah sebuah tindakan rasional Korea Utara dalam rangka untuk bertahan dalam sistem internasional, Korea Utara percaya bahwa dirinya akan aman dari serangan negara lain jika negaranya mengembangkan nuklir atau bisa kita sebut *security dilemma*, dimana konflik yang terjadi berdasar pada adanya rasa tidak aman terhadap negara sekitar. walaupun perang Korea telah usai ini tidak menjamin Korea Utara akan aman dari negara lain terutama negara adidaya AS yang beraliansi dengan Korea Selatan.

Pada perkembangan isu nuklir di Semenanjung Korea ini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat dua kekuatan yang di pakai untuk mencapai kepentingan negara yaitu *hard power* dan *soft power*. Dalam hal ini adalah negara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada awalnya kedua negara semenanjung ini sama-sama menggunakan *hard power* dalam menyikapi konflik antar Korea. Korea Utara dengan pengembangan nuklir dan uji coba rudal balistiknya, sedangkan Korea Selatan dengan pelatihan militernya di Semenanjung Korea dengan Amerika Serikat dan penempatan nuklir di Korea Selatan oleh Amerika serika membuat keadaan di Semenanjung Korea semakin memperkeruh hubungan antar keduanya.

Dengan sikap Korea Utara yang semakin agresif membuat Korea Selatan

mulai melakukan gebrakan dengan *soft power* sebagai upaya resolusi konflik di Semenanjung Korea. terutama pada kepemimpinan Moon Jae In, presiden Korea Selatan ini sejak awal kepmipinanya telah mendeklarasikan untuk tidak akan menruntuhkan Korea Utara dan bahkanakan menganggap Korea Utara sebagai kawan potensial. ini dibuktikan dengan berlangsungnya Deklarasi Panmunjom partisipasi Korea Utara dalam Olimipade Musim Dingin di Pyeongchang akibat desakan Moon Jae In. hasil dari menggunakan *soft power* ini memberikan dampak positif karena menciptakan rekonsiliasi, perdamaian dan kesejahteraan bagi Korea tanpa paksaan atau militerisasi. Poin penting yang dihasilkan adalah terciptanya denuklirisasi, rezim damai, kunjungan Pyongchang, reuni keluarga, bergabung dalam kekuatan olahraga, menghilangkan ketegangan militer dengan perlucutan senjata, mendeklarasikan tidak ada perang di Semenanjung Korea.

Dengan demikian tiga pilar kebijakan Moon Jae In berhasil dilaksanakan dengan tercapainya tiga *set goals* yang deklarasikan Moon Jae In pada pidato awal masa kepemimpinannya. Dan perubahan *hard power* ke *soft power* menghasilkan dampak positif bagi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldikawati, M. (2015). Masa Depan Reunifikasi Korea (Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin). *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*,

I(1), 33–61.

- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1971). *Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis* (Vol. 327, Issue 729.1). Little, Brown Boston.
- Bhiswara, B. (2018). Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan : Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon-Jae In 2017-2018. *Jurnal Hubungan Internasional*, *11*(2), 207–225.
- Delbora Setiawan. (2015). *Hard power Vs Soft power* . Kompasiana. Diunduh dari: <https://www.kompasiana.com/deborasetiawan/5509fc4c813311761cb1e82a/hard-power-vs-soft-power/> tanggal 16 Oktober 2020
- Ericssen. (2017). *Sejarah Pengembangan dan Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara*. Kompas. Diunduh dari: <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/22032581/sejarah-pengembangan-dan-uji-coba-senjata-nuklir-korea-utara?page=all/> tanggal 15 Oktober 2020
- Fischer, D. (1997). *History of the International Atomic Energy Agency. The First Forty Years*.
- IAEA. (1998). *Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards*. Diunduh dari: <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards/> tanggal 10 Oktober 2020
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics: A Quarterly Journal of International Relations*, 167–214.
- Kartini, I. (2018). Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un. *Jurnal Penelitian Politik*, *15*(1), 1–13.
- Lee, C. M., & Botto, K. (2018). *President Moon Jae-in and the politics of inter-Korean Détente*. Washington, DC: Carnegie endowment for international peace [online].
- Maruster, L. (2013). *Qualitative research methods*. Sage.
- Moon Jae-in's Policy on the Korean Peninsula*. (2017). Ministry of Unification. Diunduh dari: https://www.uniKorea.go.kr/eng_uniKorea/policyIssues/Koreanpeninsula/goals/ tanggal 16 Oktober 2020
- MOREN, R. G. S., & Waluyo, T. J. (2014). *Reaksi Korea Utara terhadap Kebijakan Korea Selatan Memberhentikan Bantuan Ekonomi terhadap Korea Utara (2008-2011)*. Riau University.
- Muhamad, S. V. (2018). Isu Keamanan Di Semenanjung Korea Dan Upaya Damai Parlemen. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *7*(1).
- Noorzaman, A. (2020). Peran Olahraga Sebagai Alat Diplomasi Penyelesaian Konflik di Semenanjung Korea Pada Tahun 2018. *Independen*, *1*(1), 22–29.
- Nye Jr, J. S. (2004). *Soft power* . In *Power in the global information age* (pp. 76–88). Routledge.
- Pratamasari, A. (2019). Kim Jong-Un's Change of Stance: North Korea 's rapprochement for Peace in 2018. *North Korean Review*, *15*(2), 23–37.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. KBS World Radio. (2020). Peristiwa-Peristiwa di Semenanjung Korea . Diunduh dari: http://world.kbs.co.kr/special/northKorea/contents/archives/faq/intro_nuclear_issue.htm?lang=i/ tanggal 17 Oktober 2020.
- Wirawan, M. kencana. (2020). 5 Fakta 70

Tahun Perang Korea . *Kompas*. Diunduh dari:

<https://www.kompas.com/global/read/2020/06/27/115214670/5-fakta-70-tahun-perang-Korea?page=all/> tanggal 15 Oktober 2020.